



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 930/IV/X/2016

**Pansus DPR Setujui RUU Merek
dan Indikasi Geografis**

**Demokrasi Ideal Butuhkan
Political Finance yang Baik**

**Legislator Harapkan Pemerintah
Bantu Korban Banjir Padang**





Pansus RUU Merek dengan Menkumbam

Pansus DPR RI Setujui RUU Merek dan Indikasi Geografis

Dewan Perwakilan Rakyat akan segera mengesahkan RUU Merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Desy Ratnasari di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10) usai penandatanganan persetujuan RUU tersebut oleh Wakil-wakil Fraksi dan Pemerintah.

“Insya Allah segera disahkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semoga RUU ini bisa melindungi, melayani dan memberikan kebutuhan sesuai harapan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka pendaftaran merek, melindungi merek dan juga mengajarkan kepada masyarakat untuk bangga dengan produk-produk mereka,” jelas politisi dari Fraksi PAN itu.

Hal senada disampaikan anggota Pansus Hetifah Sjaifudian, substansi baru dalam RUU tersebut yakni, indikasi geografis akan memperkuat para pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta menggali potensi kekayaan lokal.

“Mudah-mudahan dengan adanya masukan baru terkait indikasi geografis akan memberikan banyak keuntungan khususnya kepada pelaku usaha kecil yang ada di daerah supaya tidak hanya lebih produktif tapi juga terlindungi dalam

menghadapi persaingan global,” ungkap politisi Golkar Dapil Kaltim.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan RUU usulan pemerintah ini diharapkan mampu meningkatkan peran merek menjadi terutama dalam menjalankan persaingan usaha yang sehat.

Disebutkan Yasonna, beberapa poin pokok dalam RUU Merek, antara lain, mekanisme pendaftaran merek untuk mempercepat pelayanan serta memberikan kepastian hukum bagi dunia industri perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dari lokal, nasional, hingga regional.

RUU Merek dan Indikasi Geografis merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Rencananya, RUU tersebut akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebelum reses akhir Oktober. ■

(ann.mp) Foto: Azka/br

Tidak Boleh ada Perda Ambil Alih Fungsi Institusi Budaya

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon menerima kunjungan pengurus Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kerajaan dan Kesultanan Nusantara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kedatangan perwakilan Silatnas Kerajaan dan Kesultanan Nusantara tersebut guna menyampaikan berbagai keluhan yang dialami terkait peristiwa pengambil alihan secara paksa aset kerajaan Gowa oleh Pemda setempat, akibat diterbitkannya Perda LAD Kabupaten Gowa Nomor 5 tahun 2016 tentang Pengelolaan Lembaga Adat dan Budaya Daerah.

“Memang ada sejumlah kejanggalan atau keanehan, yakni bagaimana sebuah institusi budaya yang sudah turun temurun, bisa diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Padahal ketika kita sudah mendirikan Republik, maka kita selalu mempunyai penghargaan dan apresiasi kepada kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara,” ucap Fadli Zon, Senin (17/10) sore.

Fadli juga mengatakan, bahwa penghargaan terhadap institusi budaya itu memang sudah seharusnya, tidak pernah ada kejadian serupa seperti yang terjadi di Kerajaan Gowa. Ini menjadi satu hal yang menarik perhatian dan cukup mencolok, walaupun dirinya belum tahu apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kejadiannya.

"Namun berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada pertemuan ini, menurut saya memang seharusnya tidak boleh ada peraturan daerah yang mengambil alih fungsi-fungsi institusi budaya yang telah ada sejak lama. Karena hal itu pasti akan mengganggu tatanan yang sudah ada, dan tatanan tersebut termasuk juga tatanan mengenai hukum adat dan lain sebagainya," jelasnya.

"Saya sangat mendukung upaya dari Raja Gowa yang ke 37, dalam mencari dan menegakkan keadilan. Sebab



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon

pengambil alihan paksa yang terjadi itu tidak pada tempatnya, apalagi menggunakan cara-cara vandalisme atau perusakan terhadap aset-aset kerajaan Gowa," tegas Politisi F-Gerindra tersebut.

Ia juga mengatakan, sesuai dengan tupoksinya, DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Fungsi pengawasan itu tidak semata-mata hanya kepada pemerintah pusat, namun sampai juga ke daerah, apalagi hal ini menyangkut tentang berbagai kebijakan.

"Sepintas saya menyimak, bahwa Kementerian Dalam Negeri telah sependapat untuk membatalkan Perda

tersebut, saya kira ini merupakan satu langkah yang benar, namun harus segera direalisasikan, karena bila tidak hal ini akan menimbulkan potensi konflik yang berkepanjangan," ungkapnya.

Menurutnya, dengan dibatalkannya Perda tersebut maka satu persoalan menjadi selesai. Kalau DPRD Gowa tidak dapat melakukan hal itu, maka dapat diambil alih oleh Kemendagri, dalam hal yang sifatnya khusus seperti itu, karena sudah sangat mengganggu dan membuat keresahan.

"Saya akan teruskan hal ini kepada Komisi II dan Komisi III DPR RI, saya juga akan meneruskan masalah ini langsung kepada Kabareskrim ataupun Kapolri terkait laporan yang telah dilakukan oleh pihak Raja Gowa. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan agar proses hukum harus segera dilaksanakan supaya ada kepastian hukum. Sebab semakin lama hal ini ditunda, maka akan menimbulkan konflik. Ini adalah mengenai hak adat yang sudah turun temurun yang tiba-tiba direbut dan dikudeta sedemikian rupa oleh satu proses politik tanpa melibatkan keluarga kerajaan Gowa," pungkasnya. ■

(depump) Foto: Hamdahir

BULETIN PARLEMENTARIA



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naeufroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Muriyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon Ifan, Siti Rondiyah, Oji **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

[ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

Fadli Zon Terima Aspirasi Demonstran

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aspirasi para demonstran dari Solidaritas Perempuan NKRI, Pimpinan Romi Savitri & Titiek Murniaty. Para demonstran menuntut agar Gubernur DKI Jakarta tidak berpihak kepada pengembang, serta mengabaikan nasib rakyat Jakarta yang digusur. Mereka meminta agar DPR RI bisa menjembatani kepentingan masyarakat korban penggusuran kepada Pemprov DKI.

“Ini kan tuntutan masyarakat ya, tentu DPR RI harus menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Beberapa tuntutan itu saya kira masuk akal, seperti *stop* penggusuran, *stop* reklamsi, *stop* human trafficking,” ungkap Fadli di tenggah-tengah para demonstran yang ada di Gerbang Utama DPR RI, Senin (17/10).

mengatakan, akan menyalurkan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak terkait. Sebagai tugas dan fungsi DPR RI



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aspirasi para demonstran dari Solidaritas Perempuan NKRI

mengawasi pemerintah. "Saya kira itu adalah suara hati mereka. Tentu kita

mendengarkan dan menyalurkan," ujar Fadli.

Fadli juga menyinggung dalam penggusuran-penggusuran yang ada di Jakarta tidak boleh melibatkan TNI. Karena dalam aturan TNI tidak bertugas untuk mengamankan penggusuran, tapi menjaga negara dari ancaman luar.

"Penggusuran tidak boleh melibatkan TNI, apa lagi kalau itu masih bisa diatasi oleh Satpol PP, dan paling tinggi oleh Polisi. Pelibatan

TNI dalam penggusuran menyalahi tupoksi TNI," papar Fadli. ■

(dib), Foto: hamdi/br.

Fadli Zon Khawatirkan Perkembangan Koperasi di Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan perkembangan koperasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi banyak koperasi yang tumbang, salah satunya dikarenakan tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan kurangnya ruang gerak koperasi.

Hal tersebut dikatakan Fadli usai beraudiensi dengan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (PKPN RI) di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/10).

"DPR RI bisa mendorong hal ini melalui komisi terkait untuk dibahas, agar koperasi yang masih ada bisa dipertahankan dan bisa tumbuh lagi koperasi lainnya, dan pemerintah juga perlu memberikan perhatiannya," jelasnya.

Fadli menambahkan, hal ini juga sesuai dengan keinginan Presiden yang ingin melakukan reformasi total terhadap koperasi, "Apalagi koperasi juga berfungsi memberdayakan individunya dengan

memberikan keuntungan yang dirasakan bersama oleh masyarakat, tidak hanya segelintir orang seperti badan usaha lain," terang politisi dari Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Fadli menjelaskan, bahwa dalam pertemuan tersebut, PKPN RI meminta kepada DPR RI untuk menyampaikan kepada pemerintah untuk

tidak menyamaratakan antara pajak koperasi dengan pajak badan usaha.

"Saya rasa ini penting, karena koperasi melibatkan masyarakat yang lebih banyak, tidak seperti



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terima pengurus Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (PKPN RI)

badan usaha yang di dalamnya ada sistem kapitalistik seperti CV yang mencari keuntungan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja," lanjutnya. ■

(rnm), foto: Hamdi/br.

Demokrasi Ideal Butuhkan *Political Finance* yang Baik

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui, pemilihan langsung di setiap suksesi kepemimpinan dari kepala desa sampai presiden membutuhkan dana yang sangat mahal. Oleh sebab itu, agar para pelaku politik tidak mencari dana dari sumber yang melanggar aturan untuk menutupi pengeluaran dana kampanye yang mahal, maka dibutuhkan *political finance*.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

“ Semua *direct election* dari kepala desa sampai presiden ini akhirnya menjadikan demokrasi yang mahal. Karena orang harus menyiapkan atribut, harus menyiapkan alat pengenalan dan sebagainya, perlunya *political finance*,” ujar Fadli, baru-baru ini di *Operational Room*, Gedung Nusantara.

Sepulang dari lawatannya ke Meksiko, Fadli menceritakan, di negara tersebut partai politik mendapat sumbangan dari negara dengan total 200 juta dolar per tahun. Yang 30 persen *equality*, dan 70 persen *proportionally*, atau sesuai dengan perolehan kursi.

Sedangkan aturan di Indonesia saat ini partai politik mendapat bantuan dana dari negara hanya 108 rupiah per suara. Menurut Fadli jumlah yang saat ini tidak realistis, dia mengatakan untuk membayar listrik sekretariat saja masih kurang. Dia membandingkan aturan di Indonesia pada tahun 1955 parpol diperbolehkan melakukan usaha guna membiayai kebutuhan organisasi.

Namun saat ini parpol tidak diperbolehkan berusaha, sehingga dana parpol pun hanya dari sumbangan kader. “Jadi sekarang partai politik tidak boleh berusaha, dulu di tahun 55, partai politik boleh punya perkebunan, boleh punya pom bensin, boleh punya warung, boleh punya macam-macam. Jadi partai politik udah kaya PT juga di tahun 55,” ujar Fadli mengisahkan.

Untuk memenuhi pembiayaan politik, sumbangan dana dari kader, tentu bukanlah cara yang profesional. Hal ini bisa berakibat manipulasi ketika menduduki jabatan publik.

“Sekarang partai politik tidak boleh (berusaha), terus dari mana uangnya. Uang partai politik ini hanya sumbangan dari anggota legislatif, pemotongan (gaji) dari Anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan sumbangan dari kader-kader pengurus-pengurus,” papar Fadli.

Menurut Wakil Ketua Bidang Korpolkam ini, 108 rupiah per suara masih belum cukup. Dia mengusulkan 5.000 rupiah per suara. “Waktu itu sudah saya sampaikan langsung ke presiden, di depan para pimpinan fraksi ketika rapat konsultasi. Pada prinsipnya presiden meyetujui,” jelas Fadli.

Menurutnya untuk membangun demokrasi yang ideal perlu dukungan yang memadai dari negara. Partai politik punya peran besar dalam menciptakan demokrasi yang tertib, karena merupakan pilar demokrasi. “Kalau menurut saya sih memang harus ditingkatkan, kita ingin membangun demokrasi dan mengurangi korupsi. Karena partai politik itu kan pilar demokrasi. Sebagai pilar demokrasi maka harus ada *supporting* yang cukup layak memadai,” harap Fadli.

Lebih lanjut dia menjelaskan, di Meksiko kampanye dibiayai oleh negara. Bahkan stasiun televisi nasional atau swasta diharuskan memberikan jatah waktu untuk partai berkampanye karena tv merupakan ruang publik, bukan milik pribadi. Kampanye tv dibagi rata, jadi tv tidak boleh menarik biaya iklan dari parpol, pembagian waktu kampanye diberikan secara merata, setiap parpol mendapat jatah delapan menit untuk berkampanye lewat tv.

“Semua partai kebagian, kalau dia tidak menayangkan, televisi itu akan kena denda, dan dendanya cukup mahal. Karena televisi itu ruang publik. Kalau sekarang kuat-kuatan membayar iklan, atau yang punya tv yang kebetulan di partai politik, jor-joran tiap hari diputer lagu partainya, padahal ini ruang publik. Masalahnya tidak diatur dengan baik, agar ada keadilan. Karena ini ruang publik,” papar Fadli. ■

Bawaslu Diminta Hadirkan Penyidik Berpengalaman Atasi Kecurangan Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan meminta Bawaslu untuk mampu menghadirkan penyidik yang berpengalaman dan berkualitas untuk menghadapi kecurangan dalam pemilu. Mengingat, pemilu diprediksi akan berlangsung secara sengit. Hal itu diungkapkan saat RDP dengan Bawaslu pada Jumat, (14/10) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“ S o a l penyidik, kalau di peraturan sebelumnya itu diatur harus memiliki selama tiga tahun pengalaman di bidang hukum,



Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan

tapi saat ini tidak ada,” tegas Arteria. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan penyidik berkualitas dan memiliki pengalaman.

Politisi PDI-P ini menegaskan agar Bawaslu mampu menghadirkan penyidik hebat untuk mengawal demokrasi. Mengingat demokrasi yang baik juga dipengaruhi oleh penyelenggara pemilu yang baik pula. “Kalau bisa, ini dihadirkan penyidik yang hebat untuk kawal demokrasi,” papar Arteria.

I a pun menegaskan penyelenggaraan pemilu yang baik sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi. Sehingga ini patut menjadi perhatian Bawaslu. “Pemilu ini penting, jadi tidak hanya korupsi saja yang dihadirkan penyidik yang hebat,” tutup Arteria. ■

Paripurna DPR RI Sahkan RUU Perubahan Iklim Menjadi Undang-Undang

Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian masyarakat dunia dan bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim.

Oleh karena itu, Rapat Paripurna DPR RI ke IX Masa Sidang 1 tahun 2016-2017 pada Rabu, (19/10) di Gedung DPR RI, Jakarta, telah menyetujui RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bertindak sebagai ketua rapat.

"Apakah laporan Komisi VII DPR RI mengenai RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change atau Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Persekitaran Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim dapat disetujui menjadi Undang-Undang?" tanya Agus Hermanto. "Setuju...!" jawab seluruh hadirin Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu dalam rapat pada Senin, (17/10) menyatakan seluruh fraksi-fraksi menyatakan persetujuan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas



Pimpinan DPR RI berjabat tangan dengan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu

Konvensi Kerangka Kerja Persekitaran Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim untuk dibahas pada tingkat II.

Potitisi Gerindra ini berharap dengan disetujuinya RUU tersebut dapat menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk perlindungan lingkungan hidup, terutama untuk menghadapi perubahan iklim.

"Harapannya jika RUU ini telah disahkan menjadi UU dapat menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendukung perlindungan lingkungan hidup khususnya terkait dampak upaya mengatasi perubahan iklim," tutur Gus Irawan.

Sebagaimana diketahui, Persetujuan Paris bersifat mengikat secara hukum dan

diterapkan semua negara (legally binding and applicable to all) dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing dan memberikan tanggung jawab kepada negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas dan alih teknologi kepada negara berkembang. ■

(b), foto: runy_limo/br.

Ekonomi Berkeadilan Belum Terwujud dalam Dua Tahun Pemerintahan Jokowi

Selama dua tahun Pemerintahan Jokowi berjalan, tak tampak ekonomi berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Sejumlah lembaga survei kerap menilai kinerja ekonomi pemerintah terus meningkat. Tapi fakta berbicara lain. Jauh panggang dari api.

Inilah sorotan tajam dan catatan kritis Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan yang disampaikan dalam rilisnya, Selasa (18/10). Menurut Heri, perekonomian Indonesia sejak dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengalami

stagnasi serius, bahkan cenderung menurun. Indikatornya, tahun 2014 ekonomi tumbuh 5,02 persen. Tahun 2015 turun menjadi 4,8 persen.

Stagnasi ekonomi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga 6,81 persen. Begitu juga kemiskinan absolut sudah mencapai 28,3 juta jiwa dan inflasi meningkat 5,73 persen. Nilai ekspor Indonesia menurun. Per Oktober, nilai ekspor masih mencapai

Rp200 triliun. Tapi, per Mei 2016 tinggal Rp160 triliun. Jadi, kata Heri, ada penurunan Rp40 triliun.

Cadangan devisa Indonesia juga terus tergerus oleh utang. Dijelaskan Politisi Partai Gerindra ini, pada



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

THL Penyuluh Perikanan Harus Jadi Prioritas Perekrutan

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan bahwa masalah tenaga harian lepas (THL) penyuluh perikanan harus masuk dalam prioritas anggaran 2017. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10).

“ Kita harus prioritaskan THL Penyuluh Perikanan ini, dan kita tetapkan sebagai bagian yang termasuk dalam anggaran 2017 ini, supaya tidak terjadi gejala di daerah, mengingat pentingnya peran yang telah mereka lakukan,” ucap Hermanto di sela-sela raker tersebut.

Terkait masalah tenaga penyuluh perikanan, menurut Hermanto substansinya adalah para penyuluh itu meminta kepada pemerintah agar mereka tetap diberdayakan seperti yang sudah ada sekarang. Berdasarkan data jumlah seluruh tenaga penyuluh itu ada sebanyak 2.400 orang, dan negara saat ini hanya bisa merekrut sebanyak 1.000 orang.

"Hal ini seakan terjadi perlakuan yang tidak sama terhadap orang yang



Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

telah bekerja cukup lama, yakni sejak tahun 2006. Saya pikir kebijakan kita kurang berpihak kepada mereka, oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah agar tetap dapat menyerap seluruhnya yaitu sebanyak 2.400 orang tersebut. 1.000 orang akan direkrut saat ini dan sisanya sebanyak 1.400 orang akan diprioritaskan dalam perekrutan

untuk dipekerjakan pada bagian E Nomorator," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron yang memimpin raker, mengatakan jangan sampai para THL Penyuluh Perikanan itu kehilangan pekerjaan, karena para penyuluh perikanan tersebut sudah mencintai pekerjaan di sektor perikanan.

"Kita tidak boleh skeptis memandang mereka, tetapi bagaimana memberdayakan mereka yang sudah menyukai sektor ini. Meski yang dibutuhkan saat ini 1.000 orang, tetapi yang 1.400 sisanya direkrut untuk bagian E Nomorator maka hal itu lebih baik," tandas Herman.

Herman menyatakan, semua tergantung polisi dan kebijakan dari Menteri Susi. Hal itulah yang harus bisa dipastikan pada raker tersebut. ■

(dep.mp), foto: andri/br.

Oktober 2014 utang pemerintah hanya Rp2.600 triliun. Per Mei 2016 sudah melonjak menjadi Rp3.320 triliun. Sementara cadangan devisa Indonesia hanya USD 103,56 miliar. "Ini bisa dikualifikasikan sebagai posisi kritis di tengah nilai ekspor yang menurun dan tuntutan pembayaran utang plus bunga utang yang membengkak," ucap Heri.

Kondisi utang terkini Indonesia, sambung Heri, memberi kontraksi pada nilai tukar rupiah yang masih bertengger di kisaran Rp13.000. Di sektor pajak, struktur penerimaan pajak dalam APBN makin menurun. Padahal, APBN sangat bergantung pada penerimaan pajak. "Kita memang tertolong dengan adanya hasil tax amnesty. Namun, itu belum maksimal. Sebab, selain repatriasi dana dari luar

negeri belum memenuhi target, juga dampaknya pada ekonomi riil belum terukur."

Tidak hanya itu, nilai tukar petani juga menurun dari angka 102,87 tahun 2014 menjadi 101,64 tahun 2016. Ini berarti, pandang Heri, kualitas kehidupan dan kesejahteraan petani belum terjamin secara maksimal. Inilah sisi minus perekonomian nasional selama dua tahun pemerintahan berjalan di bawah Presiden Joko Widodo.

"Saya bisa menyimpulkan bahwa selama ini, kepuasan masyarakat yang sering disebut-sebut itu hanya bagian dari citra dan pencitraan. Tapi, kalau kita turun ke daerah dan lapangan, berbagai masalah masih muncul.

Semuanya bersumber dari mundurnya ekonomi keuangan yang cukup serius. Apalagi baru-baru ini pemerintah kita telah melakukan pemangkasan anggaran transfer daerah, sehingga menjadikan batalnya beberapa program pembangunan di daerah-daerah," papar Heri panjang lebar.

Mencermati fakta ini, Heri berpendapat, ke depan ekonomi nasional akan terus tertekan. Untuk itu, politisi dari dapil Jabar IV itu berharap, agar pemerintah kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita kemerdekaan dan konstitusi. Pemerintah mestinya sudah bisa menghadirkan sistem ekonomi-keuangan yang sehat dan kredibel. ■

(mb), foto: azka/br.

Komisi V Apresiasi Pembangunan Fly Over Simpang Surabaya, Banda Aceh

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Watimena mengapresiasi rencana pembangunan *fly over* Simpang Surabaya dan *underpass* di Kota Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam. Hal tersebut terungkap saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke NAD, Sabtu (8/10).

“Kami mengapresiasi pembangunan *fly over* simpang Surabaya dan *underpass*, karena ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Banda Aceh ini. Jadi memang benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat Banda Aceh,” ungkap Michael.

Ditambahkan Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, Pembangunan *fly over* ini merupakan program *multi years* yakni selama tiga tahun.

Pengerjaannya baru dimulai pada Desember 2015 lalu dan direncanakan



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Watimena

akan berakhir pada November 2017 mendatang.

Meski demikian pihaknya melihat progress pembangunan yang terbilang cepat. Ia berharap progress ini dapat terus berjalan sesuai rencana, sehingga *fly over* yang memang sangat dibutuhkan warga Banda Aceh ini dapat segera digunakan.

Fly over ini merupakan penghubung antara lintas timur dengan pelabuhan Malahayati yang merupakan kawasan wilayah pengembangan strategis. Simpang Surabaya menjadi salah satu kawasan dengan tingkat kemacetan tertinggi di Banda Aceh. ■

(Ayuh, foto: ayuh/br)

Legislator Harapkan Pemerintah Bantu Korban Banjir Padang

Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto menyatakan pemerintah harus terjun langsung untuk menyelamatkan banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat akibat jebolnya tanggul Sungai Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang dan Koto Panjang, Kecamatan Koto Tengah. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat. Jum'at (14/10).

Bendungan irigasi di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, jebol dihantam terjangan arus Batang Air Dingin yang mengganas akibat hujan lebat, Senin (1/8). Bendungan sepanjang 70 meter itu jebol sehingga tak lagi mampu mengairi sawah seluas 1.034 Ha di kawasan itu.

"Air mulai tinggi sekitar pukul 15.00 WIB. Puncaknya sekitar pukul 16.09 WIB, terjangan air membuat bendungan jebol," ungkap Safaria (38), warga sekitar bendungan.

Menurut Penjaga Pintu Bendungan Safaria, penyebab banjir ini akibat air hujan lebat. "Volume besar membuat air meluap dan menghantam bendungan, ada 40 meter panjang

bendungan yang jebol," katanya dengan menambahkan rumahnya nyaris kena hantam air bah akibat jebolnya bendungan.

Akibat jebolnya bendungan sekitar 1.000 hektare lebih sawah di wilayah aliran irigasi dari bendungan ini terancam tidak dialiri air. "Ini juga akan terancam panen, kondisi ini sudah dilaporkan kepada pemerintah untuk dibangun lagi," pungkasnya.

Lebih lanjut, legislator dari Sumatera Barat ini meminta pemerintah untuk melakukan berbagai langkah guna menyelamatkan daerah aliran sungai. "Pemerintah melalui Kementerian harus mengalokasikan anggaran mulai dari penelitian sampai pada upaya pemulihan kembali fungsi Aliran Sungai ini. Kalau



Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto

hal ini lambat dilakukan, maka akan merugikan lingkungan khususnya para petani yang semestinya bisa memanfaatkan air sungai ini sebagai sumber mata pencaharian," kata Hermanto menambahkan. ■

(br), foto: eta bintra/br

Komisi V DPR RI Minta Pembangunan Jembatan Sungai Dareh Selesai Sesuai Target

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar pembangunan jembatan Sungai Dareh yang membentang di atas Sungai Batanghari dapat diselesaikan sesuai dengan target, demi meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Kita (DPR RI) ingin melihat dan mendorong agar semua kegiatan infrastruktur disini bisa selesai sesuai dengan target termasuk jembatan yang di sungai Batanghari ini. Jembatan Sungai Dareh ini yang tentunya sudah dibangun dua tahun berjalan melalui *multiyear*, dan kita berharap Kementerian PUPR bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang yakni Juni tahun 2017, dimana ini untuk memperlancar mobilitas penduduk di Sumatera ini khususnya di jalur tengah,” kata Yudi saat melakukan peninjauan pembangunan jembatan Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Jumat (14/10).

Meski begitu, pihaknya optimis pembangunan jembatan Sungai Dareh ini akan selesai tepat waktu. “Kami (DPR RI) pun akan dorong di 2017 untuk tetap menjadi program prioritas di APBN,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ade Rezki Pratama mengatakan kunjungan Komisi V DPR RI ke Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meninjau berbagai infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas bagi masyarakat di daerah tersebut.

“Kita melihat berbagai macam kendala dan berbagai hal-hal yang dibutuhkan oleh Pemkab Dharmasraya dan juga masyarakat disini, apalagi Bupati sudah mengekspose beberapa aktivitas dan kegiatan infrastruktur yang sedang berlangsung maupun yang menjadi harapan dan cita-cita dari masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” ujarnya.

Salah satu yang masih menjadi kendala diantaranya pembangunan jembatan Sungai Dareh, yang merupakan jembatan penghubung dan salah satu yang terpadat di jalur lintas tengah Sumatera.

“Jembatan ini memang sudah tidak sesuai dengan kepadatan lalu lintas dan ketahanan dari jembatan itu sendiri, yang kurang lebih dengan spesifikasi panjang 180 meter dengan lebar jembatan kurang lebih 7-8 meter. Ini



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia

memang menjadi salah satu percepatan yang harus kita lihat dan kita pantau, awasi secara kongkrit,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJN III Padang Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Saiful Anwar yang ikut dalam rombongan Komisi V DPR RI mengatakan progres pembangunan duplikat Jembatan Sungai Dareh saat ini telah mencapai 44 persen, lebih cepat dari target awal yaitu 36 persen.

Saiful menjelaskan bahwa Jembatan Sungai Dareh merupakan jembatan *cabre stayed* dengan bentang 120 meter, kemudian lebar 2 x 3,8 meter untuk *carriage away* serta 2 x 1,2 meter untuk pedestrian dan memakan biaya hingga Rp67,8 miliar. “Saya optimis pekerjaan ini (pembangunan duplikat Jembatan Sungai Dareh) akan selesai pada Juni 2017,” kata Saiful.

Sementara itu Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyambut baik kehadiran Komisi V DPR RI yang meninjau proses pembangunan jembatan Sungai Dareh. Pihaknya berkeyakinan kehadiran Komisi V DPR RI bisa membuat percepatan pembangunan jembatan Sungai Dareh.

“Masyarakat di sini sangat membutuhkan percepatan infrastruktur sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan Komisi V DPR

RI, bahwasanya kami memang sudah lama menginginkan pembangunan itu dan karena kekurangan anggaran dari APBD makanya atas kunjungan Komisi V DPR RI ini mudah-mudahan untuk kedepannya lebih cepat lagi pembangunannya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal DT Rajo Medan yang optimis kehadiran Komisi V DPR RI bisa mempercepat laju pembangunan jembatan Sungai Dareh. “Kita optimis dengan kedatangan anggota DPR RI, kita berharap bagaimana jembatan ini cepat selesai dan juga pelebaran jalan di Kabupaten Dharmasraya ini bisa dibuat dua jalur, karena

dua jalur bisa menghilangkan kemacetan di Dharmasraya ini,” katanya.

Seperti diketahui, jembatan Sungai Dareh merupakan infrastruktur vital di Provinsi Sumatera Barat, karena menjadi penyambung Jalan Lintas Sumatera yang membelah sungai Batanghari terbesar dan terpanjang di Sumatera Barat.

Jembatan yang ada saat ini sudah berusia senja karena dibangun lebih dari 30 tahun lampau. Seringnya air Sungai Batanghari meluap menyebabkan kekhawatiran bahaya melintas di atas jembatan. Itulah Pemda Kabupaten Dharmasraya mendesak agar jembatan tersebut secepatnya diselesaikan duplikasinya.

Duplikasi jembatan Sungai Dareh yang membentang di atas Sungai Batanghari rencananya akan rampung pembangunannya pada Juni 2017. Jembatan kabelstayed bernilai Rp91 miliar itu akan menjadi jembatan terunik di Kabupaten Dharmasraya dan bahkan di Sumatera Barat. Keberadaan jembatan Sungai Dareh itu selain untuk memperlancar angkutan, juga menjadi salah satu objek wisata yang menarik.

Turut serta dalam rombongan, Alex Indra Lukman (PDIP), Bahrum Daido (PD), A, Bakri HM (PAN), Hanna Gayatri (PAN), Musa Zainuddin (PKB), Epyardi Asda (PPP).■

DPRD Lampung Utara Harus Buat Tata Beracara Badan Kehormatan

Kepala Badan Keahlian Dewan Johnson Radjagukguk menjelaskan tentang pentingnya aturan tentang tata beracara untuk menegakkan hukum materil. Hal tersebut disampaikan pada saat melakukan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10).

“DPRD Kabupaten Lampung Utara harus membuat aturan tata beracara Badan Kehormatan, karena ternyata di DPRD kabupaten Lampung Utara belum memiliki tata beracara Badan Kehormatan. Padahal hal itu sangat diperlukan dari sudut formil dan prosedur sebagai suatu mekanisme dalam pelaksanaan tugas dari Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik,” ucap Johnson.

Tujuan kedatangan anggota DPRD Lampung Utara, kata Johnson, ingin memahami secara lebih mendalam mengenai etika yang berkaitan dengan anggota DPRD, yakni mengenai apa saja yang memang harus diatur berkaitan dengan masalah etika dan bagaimana kewenangan dari Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik DPRD.

"Sekarang ini DPR RI sudah tidak



Kepala BKD Johnson Radjagukguk terima DPRD Lampung

lagi menggunakan terminologi Badan Kehormatan, sejak ada UU nomor 17 tahun 2014 DPR RI sudah menggunakan nama Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun di tingkat DPRD masih tetap menggunakan Badan Kehormatan," jelasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara ingin mendalami sejauh mana etika tersebut dapat diatur dalam kode etik, terutama bagi anggota Dewan. Mereka juga ingin memahami tentang bagaimana tata cara pemeriksaan terhadap dugaan

pelanggaran kode etik tersebut.

"Adapun standar baku pembuatan tata beracara tersebut adalah harus dikaitkan dengan materilnya, jadi apa yang diatur didalam kode etiknya itu, mengatur tentang suatu penegakan dan mekanisme ketika ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran. Dan hal ini harus

diatur dalam aturan tentang Tata Beracara," ujarnya.

Johnson juga menjelaskan, ketika ada dugaan bahwa Anggota Dewan dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka harus ada aturan tata cara untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran itu. Karena ini merupakan prosedur hukum formil untuk menegakkan hukum materilnya. "Oleh karenanya menjadi penting, bahwa dalam menegakkan materilnya maka harus ada formilnya," pungkasnya. ■

(dep.mp), foto: azka/br

Berikan Keadilan Harga BBM di Papua

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, melontarkan pernyataan ketus kepada Direktur Pertamina. Pernyataan tersebut menanggapi kesenjangan tarif BBM, antara harga yang berlaku di Papua dengan yang berlaku di daerah lainnya. Harga BBM di Papua, mulai dari Rp70 ribu sampai dengan Rp100 ribu per liter, sedangkan harga BBM di Jawa hanya kisaran Rp7 ribu per liter.

Said menekan Dirut Pertamina agar mampu memberikan keadilan harga BBM kepada masyarakat Papua. Bahkan dia memberikan pernyataan pedas, "Harga BBM di Papua tidak adil. Copot Dirut Pertamina! lah bayangin aja harga di sana 100 ribu,

kan tidak adil bagi masyarakat Papua," ketus Said di Ruang Banggar DPR RI, Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Selasa (18/10).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini memaparkan, idealnya seluruh harga BBM di Indonesia sama rata tidak ada perbedaan antar daerah. Jika



Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah

Komisi X Dorong Bentuk Badan Perbukuan Nasional

Badan Perbukuan Nasional berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan insan perbukuan. Sehingga buku-buku ke depan bisa didapat dengan mudah, murah, gampang diakses dan bermutu.

“Badan ini sudah kita diskusikan dalam pembahasan tahap 1 RUU Sistem Perbukuan dengan pemerintah. Walaupun masih dalam perdebatan dengan MenPAN-RB, ada kekhawatiran karena sebelumnya pernah dibentuk Dewan Perbukuan,” kata Ketua Tim Panja RUU Sisbuk Sutan Adil Hendra usai pertemuan dengan Sekda Prov.Jambi dan sejumlah insan perbukuan Jambi, Jum'at (14/10).

Padaahal, lanjut Sutan, Badan Perbukuan berbeda dengan Dewan Perbukuan dahulu, saat berbentuk dewan ketuanya Presiden, wakilnya para Menteri terkait, mana bisa efektif.

"Kita usulkan Badan Perbukuan Nasional diisi oleh Eselon 1, karena bagian pengawasan buku (Puskurbuk) yang ada di Kemendikbud sekarang dipegang Eselon 3. Sehingga tidak bisa mengambil keputusan langsung"

Ia menambahkan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) saat ini juga hanya memiliki kewenangan pengawasan pada buku pendidikan yang dibuat kementerian, sedangkan buku umum tidak

ada selisih, tidak sewajarnya ada jarak harga yang sangat jauh. Padahal pendapatan pegawai di daerah pun tidak jauh lebih besar dari pada yang ada di pulau Jawa.

"Seharusnya disamaratakan di seluruh Indonesia. Kalau selisih 15 ribu 20 ribu rasional. Kalau 100 ribu di mana rasionalitas kita. gaji PNS-nya sama kok, apa beda. Jangan-jangan PNS di sana tidak dapat remunerasi, sedangkan di Jakarta dapat. Itu kan parah," Said menyesalkan.

Menurutnya gejolak konflik di Papua salah satu penyebabnya adanya ketimpangan sosial yang terjadi di Bumi Cendrawasih ini. Masalah itu diperparah dengan minimnya infrastruktur yang ada di sana.

"Di sini infrastruktur lengkap, di Papua infrastrukturnya setengah mati.

bisa diawasi.

"Jadi menurut saya, sudah tepat jika Puskurbuk diubah menjadi Badan Perbukuan Nasional dengan ditambah kewenangannya. Badan itu juga bisa mengakomodir seluruh insan perbukuan dan menjadi *leading* koordinasi," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Sutan, Badan Perbukuan nantinya akan membuat beberapa regulasi buku pendidikan maupun buku umum. Pertama, akan dibuat filter, norma dan aturan terhadap buku-buku agar berkualitas. Kedua, regulasi terhadap buku dengan harga terjangkau. Ketiga, bagaimana mendorong penerbit dan penulis supaya terus bergairah melahirkan karya-karya berkualitas, karena nantinya mereka diberikan hak dan kewajiban yang layak.

"Selama ini kita dengar masukan para penulis maupun penerbit, royalti yang didapat tidak sebanding. Semua itu sudah kitaampung, nanti kita cari sistemnya supaya dapat dituangkan dalam RUU Sisbuk," ia menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria

Udah gitu beli BBM 100 ribu lagi, ya tambah merana masyarakat Papua. Itu yang oleh presiden disentil Dirut Pertamina. Seharusnya itu tidak boleh terjadi," tandas Said.

Said cukup memahami kondisi di Papua, bahwa yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesamaan hak dalam segala macam, terutama kesamaan hak dalam mendapatkan kesejahteraan.

"Sama seperti harga semen, satu sak di sini 60 ribu, tiba-tiba di sana satu juta seratus. Kan kasihan masyarakat Papua. Yang diperlukan masyarakat Papua adalah perlakuanlah kami secara adil. Sebagaimana saudara-saudara kami di daerah lain," jelas Said. ■



Ketua Tim Panja RUU Sisbuk Sutan Adil Hendra

Gunadi menjelaskan, Badan Perbukuan Nasional ini akan berbeda peran dan fungsi dari dewan perbukuan yang lama. "Badan ini selain membuat kebijakan, tetapi juga sebagai eksekutor. Sehingga, kalau ada buku tidak layak bisa langsung ditindak. Dan Badan ini bisa mengawasi isi buku yang tidak sesuai, lalu bisa mengkoordinir kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi" kata Politisi F-Gerindra itu.

Selain itu, Badan Perbukuan nantinya akan merumuskan bagaimana penulis dan penerbit bisa mendapatkan penghasilan yang layak.

Sekda Pemprov Jambi, Ridham Priskab, mengatakan, RUU Sisbuk ini diharapkan benar-benar memberikan jaminan terhadap kualitas perbukuan, baik itu buku umum maupun pendidikan.

Dari sisi penerbit, lanjut Ridham, ada masukan dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menekankan, RUU Sisbuk ini harus dapat melindungi hak-hak penulis dan penerbit. Karena selama ini tidak seimbang antara royalti dengan biaya yang dibuat.

Ditambahkannya, perlu juga dibuat regulasi mengenai tata kelola penerbitan itu sendiri, karena di Jambi ini banyak yang belum tahu dan perwakilan IKAPI di Prov Jambi penerbit baru ada dua. Akhirnya dia mengharapkan, RUU Sisbuk ini harus mampu mengangkat harkat dan martabat para penulis maupun penerbit. ■

(ebo), foto: jay/hr.

(tikmp) foto: jakab/hr.

Imam Suroso Setujui Usulan Pembentukan Struktur Baru Untuk Perkuat BPOM

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menyetujui usulan dari Kepala BPOM Penny K. Lukito yang ingin membentuk struktural organisasi baru demi memperkuat BPOM dalam memberi efek jera kepada para pelaku yang mengedarkan makanan, obat dan vaksin palsu namun dengan catatan.

“ Saya setuju atas ide Kepala BPOM, tujuannya pun baik agar BPOM semakin kuat, namun saya ingin memberi catatan agar dalam pembentukan struktural baru tersebut jangan menggunakan anggaran untuk program yang sudah dirancang lama,” kata Imam kepada Parleментарia usai rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/10).

Lebih lanjut, Politisi F-PDI Perjuangan ini berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa menambahkan anggaran untuk rencana tersebut.

“Saya berharap pemerintah berikan anggaran tambahan kepada BPOM. Ini agar tidak merusak program yang lainnya. Atau di pending saja untuk tahun 2018 atau menunggu APBN-P. Karena kalau mengambil yang sudah ada saya khawatir programnya nanti jadi berantakan,” tuturnya.

“Kita minta Kemenkeu dan Bappenas bisa menambahkan anggaran untuk membuat struktural baru yang memang bagus. Kami akan bantu lobi, agar BPOM bagus dan semakin kuat. Saya yakin kalau ini dijalankan, masalah vaksin palsu, obat palsu tidak ditemukan lagi,” lanjutnya.

Imam menambahkan, Komisi IX tetap akan mengawal dan memperjuangkan baik anggaran, pelaksanaan dan pengawasannya, “Karena kita tidak ingin masyarakat yang jadi korban lagi,” tegasnya.

Hal senada juga

disampaikan anggota Komisi IX Irgan Chairul Hafiz mengatakan, terkait struktural baru tentu punya konsekuensi terhadap anggaran, pihaknya tidak ingin struktural baru yang akan dibentuk mengambil pagu anggaran yang sudah di programkan sebelumnya.

“Kalau bisa anggaran untuk pembentukan struktural, BPOM bisa minta kepada pihak pemerintah, yakni Bappenas dan Kemenkeu. Kalau menggunakan anggaran sebelumnya, kita khawatir target-target program yang ada itu terganggu,” ujarnya. ■



Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso

(rnm), foto: jayadi/br.

Masih Banyak Persoalan Guru Yang Belum Dituntaskan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menangani persoalan guru masih banyak yang perlu dituntaskan. Salah satunya terkait syarat minimal kualifikasi guru.

“Beberapa persoalan harus dituntaskan Kemendikbud, misalnya, dari 3,9 juta guru, baru 1 juta guru yang memenuhi syarat minimal kualifikasi akademik S1 atau Diploma IV. Bahkan, dari dari tersebut, baru 1,9 juta yang tersertifikasi,” jelas Fikri, dalam rilis yang diterima Parleментарia, Jumat (14/10/2016).

Menurut politisi F-PKS itu, di tengah minimnya jumlah guru yang baru

tersertifikasi tersebut, anak-anak Indonesia harus mengalami kenyataan bahwa hingga tahun 2020, terdapat 316 ribu guru yang akan mengalami pensiun. Persoalan ini harus segera dicari solusinya.

“Artinya, rata-rata per tahun terdapat 75 ribu guru yang pensiun. Persoalan ini, jika tidak dicari solusinya secara cepat dan bijaksana, akan mengurangi daya saing anak bangsa

dalam menghadapi era globalisasi karena rekrutmen tenaga pendidik baru yang berkualitas lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan anak Indonesia yang masuk usia sekolah,” jelas Fikri.

Minimnya kemampuan pemerintah untuk menghasilkan tenaga pendidik baru berkualitas tersebut, tegas Fikri, tercermin dari daya tampung asrama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berkisar di

angka 5000 orang. Padahal, kebutuhan untuk memenuhi hal tersebut per tahun sebesar 40.000 per tahun.

"Padahal, LPTK tersebut memiliki peran penting untuk menjadi tempat pelaksana sertifikasi guru yang telah ditetapkan Kemenristekdikti kepada para sarjana untuk menjadi tenaga pendidik. Oleh karena itu, fungsi koordinasi antara Kemenristekdikti dan Kemendikbud harus terus ditingkatkan. Target Kemenristekdikti untuk memenuhi target 46 dari 17 LPTK di tahun 2016 ini, harus tercapai," tegas Fikri.

Oleh karena itu, sebagai mitra dari Kemenristekdikti dan Kemendikbud,

Komisi X akan senantiasa mendorong kementerian tersebut untuk menginventarisasi masalah guru, terutama terkait kualifikasi dan sertifikasi guru, serta memberi solusi pengangkatan dengan mempertimbangkan usia, masa kerja, dan sebagainya.

"Untuk itu, Komisi X mendorong kementerian terkait agar membuat *blue print* peningkatan produktifitas lulusan guru yang berkualitas, melalui peningkatan kapasitas asrama LPTK, dan yang paling penting adalah peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T, yaitu Terluar, Terdepan, dan Tertinggal," harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih

(sf) foto: trans7/br.

Komisi II Minta BPN Sulsel Batalkan HPL No.01 Manggala

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria untuk membatalkan HPL No 01/Kelurahan Manggala atas nama pemerintah kota Makassar dan menerbitkan sertifikat atas nama para ahli waris Fachrudin Daeng Romo sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kesimpulan RDP Komisi II DPR RI dengan Ditjen Penanganan Masalah Agraria Penataan Ruang dan Tanah, Kepala Kanwil BPN Sulawesi Selatan, Walikota Makassar, Polda Makassar dan Camat Manggala pada Senin, (17/10).

"Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN untuk menindaklanjuti hal di atas dengan membatalkan HPL No

01/Kelurahan Manggala atas nama pemerintah kota Makassar dan menerbitkan sertifikat atas nama para ahli waris Fachrudin Daeng Romo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," ujar Ahmad Riza Patria selaku ketua rapat.

Wakil Ketua Komisi II ini juga meminta Kementerian Agraria untuk melaksanakan isi putusan PTUN Ujung Pandang mengenai sengketa lahan yang ada di kecamatan Manggala, Makassar. "Komisi II DPR RI meminta kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan PTUN Ujung Pandang No 57/G/TUN.U.Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN No 58/Bdg TUN/1997/PT.TUN.U.Pdg jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI no 173K/TUN/1998 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 66/PK/TUN/2000 pada tanggal 11 juni 2004," tutur Riza Patria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga meminta walikota Makassar

dan DPRD Makassar untuk melaksanakan isi putusan PTUN yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap. "Komisi II DPR RI meminta kepada Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar untuk melaksanakan dan mematuhi isi putusan PTUN No 49/G/TUN/1993/ P.TUN.U.Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN No 20/Bdg TUN/1994/PT TUN U.Pdg jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 111 K/TUN/1995 yang telah berkekuatan hukum tetap," tegas Riza.

Tak hanya itu, Komisi II DPR RI juga meminta pemerintah Kota Makassar untuk tidak menerbitkan izin atas tanah eks HGU Nomor 1 Kampung Manggala atas nama Hasyim Daeng Manappa. "Komisi II DPR RI juga meminta kepada Pemerintah kota Makassar untuk tidak menerbitkan izin dalam bentuk apapun di atas tanah eks HGU No 1/Karuwisi Kampung Manggala atas nama Hasyim Daeng Manappa beserta turunannya sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap," pungkas Politisi Gerindra tersebut. ■



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria

(bswmp) foto: aka bindra/br.

Kurtubi Apresiasi Kebijakan BBM Satu Harga

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menyeragamkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di semua Provinsi dan daerah di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat.

“ Saya sangat mengapresiasi kebijakan BBM satu harga oleh pemerintah. Ini memiliki dampak positif, diantaranya meningkatkan daya beli, dan peluang mempercepat pembangunan di tanah Papua. Selain itu yang terpenting adalah pengimplementasian BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai rakyat Papua sepertinya memiliki alasan untuk memisahkan diri dari NKRI karena harga BBM Papua yang sangat mahal dibanding provinsi atau daerah lain di Indonesia, mencapai Rp 100 ribu per liter. Ini menunjukkan bahwa NKRI menjadi satu wilayah kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak dibedakan,” papar Kurtubi.

Dilanjutkannya, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan sebagai konsekuensi kebijakan BBM satu harga ini. Diantaranya adalah dengan cross subsidi (subsidi silang). Subsidi untuk pendistribusian BBM Pertamina ke Papua bisa dibiayai lewat keuntungan bisnis Pertamina lainnya.



Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi

Misalnya Pertamina memiliki keuntungan dari bensin pertamax yang nol subsidi. Disini pemerintah jangan mengambil dulu keuntungan tersebut, karena bisa digunakan untuk "menomboki" kekurangan subsidi dalam pendistribusian BBM ke Papua. Selain itu ada keuntungan bisnis Pertamina lainnya, seperti penjualan pelumas atau lubricant serta penjualan produk-produk lain yang memperoleh keuntungan.

"Kalau pemerintah sudah menerapkan kebijakan demikian saya yakin Pertamina tidak akan ragu-ragu lagi untuk menggunakan hasil keuntungan bisnisnya untuk membiayai pendistribusian BBM ke Papua. Sebagai salah satu konsekuensi negara kesatuan," tambahnya.

Selain itu menurut Politisi dari fraksi Partai Nasdem ini, alternatif lainnya adalah dengan mengupayakan membangun kilang BBM yang memadai di tanah Papua. Saat ini kilang BBM di Papua hanya ada di Sorong, dan itupun kapasitasnya masih relatif kecil dan belum memadai. Ia berharap dapat dibangun kilang BBM dengan kapasitas yang cukup besar di tanah Papua. Hal ini akan mengurangi biaya pendistribusian BBM.

Karena biaya pendistribusian BBM di Papua yang paling besar adalah biaya angkut ke daerah-daerah pegunungan. Dengan adanya kilang di daerah-daerah di Papua, maka otomatis akan mengurangi biaya distribusi atau biaya angkut BBM ke daerah-daerah tersebut. ■

(guy)foto:nni/br

Komisi VI Evaluasi Pengoperasian Terminal 3 Bandara Soetta

Ramai kalangan yang menilai, awal pengoperasian Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta masih banyak kekurangan, pihak PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan pihak yang sangat bertanggung jawab dalam kelemahan tersebut. Menanggapi masalah ini Komisi VI DPR RI yang memiliki ruang lingkup pengawasan BUMN telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada akhir bulan Agustus lalu.

“ Menindaklanjuti peninjauan langsung ke lapangan, Komisi VI menyelenggarakan RDP dengan Direktur Utama AP II Muhammad Awaludin didampingi PLT. President Director Djoko Murjatmodjo. Dalam

rapat, Komisi VI mengevaluasi Terminal 3 dengan pertanyaan kritis, serta mengharapkan agar rencana pembangunan Terminal 4 bisa lebih baik dibandingkan Terminal 3.

Anggota Komisi VI Eriko Sotarduga

menekankan jajaran AP II agar melakukan perbaikan secara serius. Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengeluhkan soal kebersihan toilet, lampu di Terminal 3 yang menyilaukan dan



Anggota Komisi VI Eriko Sotarduga

mempertanyakan kapan pembangunan shelter bus di terminal baru ini.

"Bagaimana PT AP II mengatasi permasalahan kebersihan dan desain toilet. Rencana pembangunan Terminal 4 harus lebih baik dibandingkan Terminal 3," ujar Eriko di ruang rapat Komisi VI, Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (17/10) sore.

Dia juga meminta PT AP II agar menyelidiki siapa penyebab di balik ketidaksiapan fasilitas yang ada di Terminal 3. Eriko juga mengatakan pembangunan terminal bandara bukan hanya soal mewah, tapi yang lebih penting adalah efisiensi bagi pengguna bandara.

Di lain sisi, Anggota Komisi VI Khilmi, mengkritisi pengambilan bagasi di Terminal 3

yang memakan waktu lama, selain itu juga ditemukan ada koper yang rusak. Anggota Komisi VI lainnya, Bambang Haryo Soekartono mengeluhkan lokasi mushola yang tidak strategis, sehingga mempersulit orang yang mau beribadah.

Adapun Anggota Komisi VI yang lain Nyat Kadir, mempertanyakan bagaimana PT AP II meningkatkan fasilitas dan pelayanan Terminal 3.

Menanggapi beragam pertanyaan kritis Komisi VI, Direktur Utama AP II Muhammad Awaludin yang didampingi para jajarannya menjelaskan, bahwa AP II akan melakukan evaluasi terkait dengan fasilitas yang diperuntukan bagi pengguna jasa dengan cara memperbaiki, menyempurnakan dan menambah fasilitas untuk kenyamanan pengguna jasa. ■

(eko), foto: rmi/br.

Revisi UU ASN Bukan Hanya Soal Honorer K2

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya akan mengatur masalah honorer kategori dua (K2) tetapi juga hal penting lainnya.

Hal tersebut ditegaskannya dalam Pleno Baleg saat mendengarkan pemaparan Tenaga Ahli tentang revisi UU ASN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

"RUU ini tidak hanya berbicara mengenai K2 tetapi bagaimana ada penjelasan yang lebih sinergis dan terintegrasi terkait mekanisme ASN yang kita bangun untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel," tegas politisi dari Fraksi PDI-P itu.

Terkait honorer K2, ia mengatakan dalam UU ASN tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang tenaga kontrak honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) di pemerintahan yang sudah eksis sebelum UU tersebut disahkan.

Menurutnya, harus ada tindakan afirmatif dalam UU tersebut,



Anggota Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka

sehingga pegawai non PNS yang sudah mengabdikan sekian tahun lamanya bisa mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk memiliki status pekerjaan yang pasti. "Kalau mereka tidak dikatakan kompeten kenapa juga dikontrak berulang kali, artinya kan tenaga dan pikiran mereka memang dibutuhkan," tandas Rieke.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berpendapat RUU tersebut sebaiknya mengakomodir Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai salah bentuk perlindungan sosial. Kelima jaminan tersebut ialah Jaminan Kerja, Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Hari Tua dan Kematian. "Saya kira PNS pun perlu mendapatkan jaminan ini, dan kalau pun nanti statusnya kontrak mereka tetap mendapatkan 5 jaminan itu," usulnya.

"Ini juga terkait bagaimana reformasi birokrasi berjalan di pemerintahan ke depan. Kita tidak berbicara pemerintahan pada tahun ini, atau periode ini, tapi kita berharap ada sebuah UU ASN yang stabil dan kokoh, yang tidak ganti pemerintahan lalu kita revisi," imbuh politisi dari dapil Jawa Barat VII itu. ■

(ann,mp), foto: kresno/br.

Komisi X Ingatkan Beasiswa Tepat Jumlah, Waktu dan Sasaran

Panitia Kerja Beasiswa Dikti dan Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (Panja Beasiswa Dikti dan SM3T) Komisi X DPR RI meminta kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan program beasiswa dengan tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan.

Ketua Panja Beasiswa dan SM3T Ferdiansyah saat rapat dengan Menristekdikti Mohamad Nasir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini mengatakan, pihaknya menemukan bahwa satuan biaya pendidikan sebesar Rp 600 ribu per bulan/mahasiswa ini sejak tahun 2010 tidak ada peningkatan. Satuan biaya pendidikan ini dinilai terlalu rendah terhadap kebutuhan hidup mahasiswa per bulan.

"Apalagi bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota besar, tentu jauh dari standar hidup layak. Belum lagi beasiswa yang pencairannya tidak setiap bulan, sehingga mendatangkan permasalahan bagi penerima beasiswa. Kesehatan para penerima beasiswa Bidikmisi juga menjadi salah satu permasalahan bagi perguruan tinggi penerima," kata Ferdi.

Demikian halnya dengan beasiswa PPA, lanjut Ferdi, dana beasiswa juga tidak cair setiap bulannya, sehingga hal ini dapat menyulitkan mahasiswa dalam mengatur keuangan. Permasalahan lain adalah kuota penerima beasiswa PPA yang menurun dari tahun ke tahun. Bahkan tidak ada rumusan baku antara perguruan tinggi yang satu dan yang lain dalam penentuan jumlah kuota beasiswa.

"Beasiswa untuk program studi lanjut dalam dan luar negeri juga terkendala dengan pencairan dana beasiswa yang tidak tepat waktu. Beberapa mahasiswa yang menempuh studi di luar negeri terpaksa pulang ke Indonesia tanpa menyelesaikan studinya. Selain itu ada permasalahan bagi dosen yang menempuh studi lanjut S2/S3 tidak mendapat tunjangan dosen," jelas



Pimpinan Komisi X DPR RI bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Ferdi.

Sementara terkait program SM3T, masih kata politisi F-PG itu, pada pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan. Peserta program SM3T belum memiliki bekal yang memadai mengenai daerah 3T, terutama dari sisi budaya, sehingga mengalami kesulitan adaptasi dengan budaya lokal. Proses rekrutmen yang tersentralisasi membuat perguruan tinggi kurang memiliki peran dalam program ini. Program belum didukung oleh infrastruktur dan sarana penunjang pendidikan di daerah 3T.

"Untuk itu, program beasiswa di Kemenristekdikti perlu dievaluasi secara komprehensif antara lain dari sisi waktu pencairan, satuan biaya beasiswa, sasaran yang harus mendapat beasiswa, hingga kuota beasiswa di masing-masing perguruan tinggi," jelas Ferdi.

Selain itu, harus dievaluasi juga melibatkan perguruan tinggi dalam pemberian beasiswa, perbaikan sistem pendaftaran beasiswa, dan perlunya diberikan biaya kesehatan dan/atau jaminan kesehatan.

"Mekanisme penyaluran dana beasiswa langsung ke rekening mahasiswa menyulitkan pengawasan Kopertis. Sehingga, beberapa PTS dan kopertis menyarankan agar mekanisme penyaluran dana beasiswa sebaiknya tidak langsung ke rekening mahasiswa," tukas Ferdi.

Terkait berbagai permasalahan dalam program beasiswa itu, Komisi X mendesak

Kemenristekdikti untuk segera menyusun rencana induk pengembangan sumber daya Iptek dan melakukan kajian mengenai penerima beasiswa S1/S2/S3 terhadap kebutuhan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian mengkaji kembali kebijakan program beasiswa agar tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

"Komisi X juga meminta Kemenristekdikti lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Dan melakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian atau Lembaga yang melakukan program beasiswa guna mendapatkan data yang lengkap," tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Selain itu, Komisi X juga meminta Kemenristekdikti untuk mengevaluasi proses rekrutmen beasiswa agar menjangkau seluruh calon mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, meningkatkan kuota semua jenis beasiswa Dikti dan mengevaluasi proses rekrutmen beasiswa, dan meningkatkan satuan biaya beasiswa. ■

Komisi VIII Tidak Setuju Pemotongan Anggaran Kemensos

Komisi VIII DPR RI belum dapat menerima sepenuhnya Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RKA-K/L RAPBN) Kementerian Sosial RI Tahun 2017, Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp17,5 Triliun.

Ada Pemotongan anggaran sebesar Rp800 M, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI berkoordinasi dengan Menteri Keuangan RI, agar anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2017 dikembalikan ke pagu awal sebesar Rp18,3 Triliun.



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher

Menurut Ketua Komisi VIII Ali Taher,

Pemerintah kurang mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan sosial. Ada mata anggaran yang selama ini menjadi unggulan Kementerian Sosial yaitu Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Drop dari anggaran.

"Bagi Komisi VIII ini kurang berpihak kepada rakyat, sehingga kami merekomendasikan kembali agar anggaran Rutilahu ini kembali seperti semula kalau perlu ditingkatkan, karena rumah tidak layak huni ini merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), usai memimpin Raker Komisi VIII dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/10).

Komisi VIII akan memperjuangkan anggaran ini sampai Paripurna nanti, karena ini dianggap penting. Ali Taher mengatakan inilah sebagai wajah terpenting bagi Pemerintahan 2 tahun Presiden Joko Widodo, kalau pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor lainnya mendapatkan prioritas utama sementara ini adalah sesungguhnya konstitusi mengamanatkan pembangunan masyarakat yang adil, dan sejahtera, dan ini belum terwujud.

"Oleh karenanya, kami pihak Pemerintah dan DPR RI selalu melakukan koordinasi terkait prioritas mata anggaran yang memerlukan perhatian bersama yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, dibanding yang tidak menyentuh aspek kebutuhan masyarakat," ungkapnya. ■

(ab), Foto: Jaakua/hr

Pansus RUU Terorisme Tinjau Kesiapan Kopassus Tangani Terorisme

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melakukan kunjungan kerja ke Detasemen 81 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (12/10). Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan Kopassus dalam menangani aksi terorisme.

“Kita ingin melihat sejauh mana kesiapan Detasemen 81 dalam menangani masalah terorisme dengan segala sarana dan prasarannya serta bagaimana mengantisipasinya, itu yang ingin kita lihat,” jelas Anggota Pansus Habib Aboe Bakar Alhabsyi di sela-sela peninjauannya.

Dikemukakan politisi dari F-PKS itu, sejauh ini Pansus menyetujui usulan pemerintah untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme. Menurutnya, masih banyak area yang belum mampu dijangkau kepolisian, misalnya penanganan terorisme di pegunungan, kapal laut, pesawat terbang, istana ataupun kedutaan besar Indonesia.

"Akan lebih baik bila penanganan teror yang spesifik seperti itu diberikan kepada satuan khusus, seperti Satuan Gultor 81 Kopassus yang sudah menunjukkan kemampuannya dalam operasi Wolya di Dun Muang Thailand



Tim Pansus RUU terorisme mengunjungi Kopassus Cijantung

hingga KM MV Sinar Kudus di Somalia," ungkap Habib Aboe Bakar.

Termasuk, lanjut Habib Aboe Bakar, untuk pembebasan WNI yang menjadi korban sandera di luar negeri, karena hal ini tidak dapat dilakukan oleh Kepolisian. Selain wilayah tersebut, kewenangan penanganan terorisme diberikan kepada Polri, seperti terorisme di wilayah sipil, pusat keramaian ataupun

perkotaan.

Ini menilai, nantinya pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme tidak akan menimbulkan konflik dengan kepolisian. Sebab, Polri dan TNI memiliki ranah yang berbeda. "Saya yakin bila ini diatur dengan baik dan tepat, tidak akan terjadi pergesekan karena pada dasarnya Polri maupun TNI adalah abdi negara, apapun yang ditugaskan kepada mereka, akan dikerjakan dengan baik," tegasnya.

Menurutnya, sudah semestinya kemampuan seluruh satuan yang ada dimanfaatkan dengan maksimal sebagai upaya penindakan terorisme yang terjadi di Indonesia. "Revisi RUU Terorisme ini merupakan salah satu peluang untuk mengintegrasikan seluruh potensi yang ada, sehingga kita mampu menindak setiap aksi terorisme yang terjadi," imbuh politisi dari dapil Kalimantan Selatan I itu. ■

(anna.mp)/foto:arifef/hr

Fenomena Digitalisasi Sudah Merambah Indonesia

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan) dan Zainudin Amali (F-PG/dapil Jawa Timur) turut berpartisipasi dalam kegiatan Meeting of the OECD Global Parliamentary Network di Paris, Perancis, Rabu (12/10).

Saat sesi yang bertema *Digitalisation and The Future of Work*, Evita, yang juga Anggota Komisi I DPR RI itu menyampaikan intervensi bahwa fenomena digitalisasi juga sudah merambah di Indonesia.

"Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia semakin memudahkan urusan kita sehari-hari, mulai dari proses transformasi pemesanan transportasi, mengirimkan dokumen, memesan makanan, hingga membersihkan rumah saat ini dapat dilakukan hanya dalam satu aplikasi ponsel pintar (platform)," jelas Evita.

Namun sayangnya, lanjut Evita, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan platform online dalam bisnis yang ditekuni lebih dari 30 ribu orang itu.

"Sehingga banyak menimbulkan kebingungan dan masalah terkait hubungan kerja antara pemilik platform dan para penyedia layanan jasa," kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Masih dalam kesempatan yang sama, Delegasi DPR RI juga telah mendengar lebih jauh pengalaman dari negara-negara lain terkait peraturan perundang-undangan yang mereka buat untuk menjawab fenomena *platform online*. Beberapa negara seperti Swedia, Chile, dan Jerman berbagi pengalaman terkait fenomena ini.

Pertemuan yang berlangsung sehari penuh ini membahas lima agenda utama. Pertama, Digitalisasi dan Masa Depan Pekerjaan (*Digitalisation and the Future of Work*). Kedua, Pelaksanaan Bisnis yang Bertanggung jawab (*Responsible Business Conduct*); dan ketiga, Migrasi dan Integrasi (*Migration and Integration*). Berikutnya, Regenerasi Demokrasi untuk Era Baru (*Regenerating Democracy for a New Age*);



Anggota BKSAP DPR RI Evita Nursanty dan Zainudin Amali

dan yang terakhir Kebijakan yang Sensitif Gender (*Gender-Sensitive Policies*).

Diskusi yang dipandu oleh Anthony Gooch, selaku Ketua *Global Parliamentary Network* dan Direktur Komunikasi serta Urusan Publik OECD, berlangsung hangat dari awal hingga akhir pertemuan.

Di awal pertemuan, Anthony Gooch sempat memaparkan perkembangan terbaru dari OECD Global Parliamentary Network terkait pengumpulan database anggota parlemen yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan jaringan ini.

Selain paparan dari para panelis dan pembahas mengenai isu-isu yang ada dalam mata agenda, di tengah pertemuan, delegasi dari parlemen Jepang juga memberikan presentasi mengenai hasil pertemuan OECD *Global Parliamentary Meeting* "on the road" di Tokyo beberapa waktu lalu.

Pertemuan OECD *Global Parliamentary Network* kali ini merupakan pertemuan kedua yang diadakan pada tahun ini, setelah pertemuan sebelumnya diadakan di Tokyo pada bulan April 2016.

OECD *Global Parliamentary Network* merupakan sebuah jaringan yang dibentuk oleh OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) sebagai wadah yang menghubungkan para

anggota parlemen dari negara OECD dan negara-negara partner untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam isu-isu yang menjadi perhatian OECD. Jaringan ini juga memberikan kesempatan DPR RI untuk memperkuat fungsi diplomasi parlemen khususnya dalam pembahasan isu-isu ekonomi dunia.

Kegiatan yang diselenggarakan di OECD *Conference Center*, Paris, Perancis ini dihadiri oleh lebih kurang 75 anggota parlemen dari 27 negara anggota OECD maupun negara-negara partner termasuk Indonesia, Tunisia, Kosta Rika dan Algeria. Beragamnya delegasi yang datang menambah kaya perspektif diskusi pada pertemuan tersebut. ■

(sf) foto: BKSAP

Komisi III Pertanyakan Pemotongan Anggaran 4 Mitra Kerjanya Oleh Kemenkeu

Komisi III DPR RI mempertanyakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap empat mitra kerja Komisi III, Polri, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan para mitra kerjanya tersebut di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta (18/10).

Revisi UU LPM-PUTS untuk Kepentingan Nasional

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan rancangan perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) adalah untuk mengedepankan kepentingan nasional. Diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam regulasi tersebut.

Demikian ditegaskan politisi dari F-Golkar itu dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/10).

"Revisi UU ini kita harapkan memberikan payung hukum kepada pelaku usaha yang mengedepankan kepentingan nasional dan untuk memberikan rasa keadilan tanpa ada diskriminasi kepada siapapun," tegas Ketua Panja Pengharmonisasian RUU LPMPUTS itu.

Diakui Firman, kondisi persaingan usaha saat ini semakin memprihatinkan. Berbagai komoditas strategis, termasuk kebutuhan pangan pokok yang sampai saat ini masih didominasi oleh kepentingan

para pelaku usaha.

"Bahkan yang kita khawatirkan ini adalah adanya kartelisasi. Selain itu, munculnya berbagai mini market juga menjadi persoalan. Di sisi lain, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan begitu mudah, namun kondisi itu mengikis keberlangsungan pasar tradisional," ungkapnya.

Ia berharap melalui amandemen UU LPMPUTS mampu menjadi landasan KPPU sebagai pengawas yang adil dalam setiap praktik usaha. Namun, penguatan KPPU juga tidak boleh menabrak UU lain seperti penyidik dan penyelidikan yang sudah diatur dalam KUHAP.

"Ada kekhawatiran dari Kadin bahwa KPPU ini akan merugikan pengusaha, karena ada vonis-vonis yang tidak sesuai



Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo

dengan sistemnya. Kadin tidak usah khawatir, karena RUU ini akan menjadi wasit untuk kepentingan nasional. Jika komisioner KPPU menjadi alat kepentingan kelompok tertentu, maka ini akan merusak perekonomian nasional kita," tandas politisi dari dapil Jawa Tengah III itu. ■

(amr,mp), Foto: Krasno/hr

“Ke empat mitra Komisi III itu memiliki anggaran yang cukup signifikan atau besar-besar. Secara umum mitra kami itu mengalami pemotongan anggaran. Kami melihat ini merupakan *side back* dari keadaan 3-4 tahun yang lalu. Di satu sisi pemerintah menuntut para penegak hukum, serta kementerian/ lembaga penunjang penegakan hukum untuk bekerja maksimal. Apalagi pemerintah baru saja meluncurkan paket reformasi hukum yang pertama, di sisi lain anggarannya makin terbatas. Pemotongan ini bukan untuk anggaran 2017 mendatang saja, melainkan juga anggaran 2016 lalu juga mengalami pemotongan,” papar Anggota Komisi III, Arsul Sani.

Oleh karena itu politisi dari Fraksi PPP ini mengungkapkan bahwa pihaknya beserta fraksi-fraksi lainnya akan memperjuangkan anggaran mitra-mitra kerjanya. Jika pemerintah ingin program penegakan hukum yang telah diluncurkannya itu dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Senada dengan Arsul, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart

Girsang juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menyetujui pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Meski demikian ia berharap agar mitra kerjanya itu jangan hanya membicarakan masalah anggaran, namun juga diimbangi dengan kinerja. Dengan kata lain anggaran berbasis kinerja lebih dibutuhkan saat ini.

Junimart menyontohkan setiap kali ia mengunjungi Lapas-lapas di daerah, kondisinya sangat memprihatinkan. Dimana lapas yang berukuran 3x3 menampung lebih dari enam orang. Tidak hanya itu, salah satu mitra kerjanya, Mahkamah Agung misalnya yang mengikuti ISO (Internasional Standard Operasional), namun untuk hal itu tidak dianggarkan sebelumnya.

Selain itu banyak hal yang sejatinya menjadi beban pengadilan negeri-pengadilan negeri, namun tidak dianggarkan sebelumnya. Fakta yang tidak terbantahkan adalah ketika ada petinggi MA yang turun mengunjungi pengadilan negeri-pengadilan negeri, itu butuh biaya sendiri, namun malah tidak dianggarkan.

Kondisi ini sejatinya sangat memprihatinkan. Ia berharap agar hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian dari para mitra kerjanya dalam menyusun anggaran ke depan. Meski demikian, sama halnya dengan Arsul, Junimart juga mengaku akan memperjuangkan anggaran mitra kerjanya untuk tidak mengalami pemotongan anggaran. ■

(Ayu), foto: nriq/br



Anggota Komisi III, Arsul Sani

Kontinuitas Kerja Sama Antar Parlemen Diharapkan Meningkatkan

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany berharap kepada Sekretaris Jenderal ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) yang baru saja terpilih, Isra Sunthornvut, untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen yang selama ini sudah terjalin.

Demikian dikatakannya usai menerima Sekjen AIPA yang berasal dari Thailand itu, di ruang kerjanya, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/10). Dalam kesempatan itu, Sekjen DPR RI didampingi Kepala Badan Keahlian Dewan Jhonson Rajagukguk dan Deputi Persidangan Damayanti.

"Kontinuitas kerjasama yang selama ini sudah terjalin antar parlemen, juga bergantung dengan aktifitas Setjen AIPA. Apalagi Sekjen yang baru ini berkomitmen untuk pro aktif, itu bagus sekali," apresiasi Win, panggilan akrab Winantuningtyas.

Win mengatakan, dengan adanya AIPA, DPR RI juga memiliki kepentingan. Apalagi AIPA juga sudah menjalin kerjasama dengan parlemen dengan negara-negara di Uni Eropa.

"Semoga kerjasama dapat dilanjutkan



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menerima Sekjen AIPA

dengan baik. Kami juga sampaikan dan berharap, dalam Sidang PBB nanti, beliau juga bisa mendukung perjuangan kita membangun sistem baru, untuk berjalannya kerjasama sekretariat AIPA ini dengan kita," jelas Win.

Win juga berharap, AIPA dapat semakin mendukung kegiatan parlemen

dan mendekatkan hubungan antar parlemen. Pasalnya, posisi parlemen di Asia Tenggara dinilai masih ada *gap*, karena ada yang sudah relatif maju, ada yang baru dibentuk, bahkan ada juga yang masih konflik.

"Jadi antar parlemen bisa saling membantu, dengan adanya kegiatan yang difasilitasi Setjen AIPA. Karena Setjen AIPA ada di DPR RI, kita komitmen juga memberikan dukungan," imbuh Win.

Sementara itu, Sekjen AIPA berkomitmen selama menjabat nantinya akan mewujudkan visi misinya. Walaupun belum lama menjabat, ia mengaku juga sudah bertemu dengan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. ■

(sf)/fokuska/br

Sekjen DPR RI Lantik 4 Pejabat Eselon II

Dinamika Politik yang cukup maju membutuhkan orang-orang yang tidak hanya kompeten dan berpengalaman di bidangnya, namun juga butuh orang-orang memiliki karakteristik sesuai dengan bidang dan tugas kerjanya masing-masing.

Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPR RI, Winantuningtyas Titi Swasanany usai melantik empat orang pejabat eselon II di lingkungan Setjen DPR RI, di ruang rapat Sekjen DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (17/10).

"Hari ini saya melantik empat pejabat Eselon II. Satu orang promosi jabatan karena ada kekosongan jabatan yang harus segera diisi, dan ada tiga pejabat lainnya mutasi karena ada satu jabatan kosong," ujar Win, begitu Winantuningtyas Titi



Sekjen DPR RI, Winantuningtyas Titi Swasanany saat melantik pejabat eselon II

BURT Dorong Jasindo Tingkatkan Pelayanan

Wakil Ketua Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santoso mendorong PT Jasindo meningkatkan pelayanannya. Hal ini dikemukakannya saat menghadiri sosialisasi prosedur pelayanan Jamkestama bagi Staf Administrasi Anggota (SAA) DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/10).

“ Sosialisasi ini perlu dilakukan, melihat hasil evaluasi kami dari BURT yang masih banyak mendapatkan pertanyaan maupun keluhan dari anggota yang sering menanyakan program Jamkestama,” kata politisi dari F-Demokrat itu dalam kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Diakuinya, tingkat pelayanan di setiap Rumah Sakit *Provider* belum sama antara RS satu dengan yang lain. Selain itu, waktu klaim penggantian biaya (reimbursement) pun masih menjadi kendala. “Nah, ini kadang yang menjadi persoalan. BURT akan tetap terus mengevaluasi sehingga dari tahun ke tahun ada perbaikan cukup baik,” ungkapnya.

Selain itu, kepada Jasindo, Agung juga berharap untuk segera diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) sehingga tingkat pelayanan di setiap RS *Provider* akan sama.

Kepala Unit Usaha Jasindo Health Prayidno mengapresiasi dengan diadakannya sosialisasi Program Jamkestama. Diharapkannya, kegiatan tersebut dapat membentuk pemahaman yang sama terhadap program Jamkestama.

Swasanany biasa disapa.

Dalam melakukan mutasi jabatan tersebut, lanjut Win, tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pertimbangan dan evaluasi. Namun berdasarkan *assasement*, dan hasil wawancara, diperoleh nilai dari masing-masing pejabat yang tidak hanya berpengalaman dan sesuai dengan kompetensi, namun juga memiliki karakteristik pribadi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing.

“Pemberitaan Parlemen misalnya merupakan kunci dari komunikasi antara dewan dengan masyarakat. Dibutuhkan kreatifitas untuk bisa selalu bekerjasama dengan media massa, baik media cetak, media online, maupun

” k a r e n a m e m a n g p r o g r a m i n i s i f a t n y a p e n u g a s a n d a r i K e m e n t e r i a n K e u a n g a n y a n g m a s i h a d a r a m b u - r a m b u n y a , ” j e l a s P r a y i d n o .

Sosialisasi dari badan pelaksana ini sekaligus bisa menampung k e n d a l a - k e n d a l a y a n g a d a d i l a p a n g a n

untuk dicarikan solusi dalam rangka *improvement* layanan kedepannya.

Sejauh ini, PT Jasindo telah bekerja sama dengan 832 RS Pemerintah dan Swasta di 34 Provinsi. 349 diantaranya terletak di Jabodetabek dan penambahan provider termasuk RS Rujukan daerah terus berlangsung di beberapa kota besar.

Program Jamkestama yang dikelola

media elektronik, serta para blogger dan netizen.

Sedangkan protokol yang notabene berhubungan langsung dengan dewan, memfasilitasi kunjungan dewan di bandara-bandara dan bekerjasama dengan protokol Pemda (pemerintah daerah) membutuhkan karakteristik kesopanan santunan yang cukup selain dengan kompetensi yang dimiliki,” tambah Win.

Sementara Kepala Biro BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), dalam UU MD3 dan tata tertib DPR RI, dewan memiliki fungsi diplomasi parlemen. Fungsi ini berbentuk dukungan parlemen kepada pemerintah untuk memposisikan Indonesia lebih kuat di mata internasional.



Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso dan Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

oleh PT Jasindo merupakan implementasi dari Peraturan Presiden RI No. 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI, DPD, BPK, KY, Hakim MK, Hakim Agung MA, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat negara lainnya beserta keluarganya. ■

Maka dewan membutuhkan orang-orang yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya untuk mendukungnya. Dengan pelantikan ini, ia berharap agar para pejabat di kesetjanaan DPR RI tersebut dapat mempertahankan, melanjutkan bahkan meningkatkan program-program yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya.

Keempat pejabat Eselon II yang dilantik tersebut adalah, Suratna sebagai Kepala Biro Protokol, Djaka Dwi Winarko Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Saiful Islam sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, serta Endah Tjahjani Dwirini sebagai Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen. ■

Komisi V Tinjau Lokasi Waduk dan Pelabuhan di Kabupaten Ngada

Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang giat membangun infrastrukturnya. Kali ini, Komisi V meninjau langsung rencana lokasi pembangunan waduk dan melihat dari dekat fasilitas Pelabuhan Aimere.

Sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ngada sudah dicairkan. Tidak hanya untuk pembangunan akses jalan, untuk pembangunan waduk pun anggarannya sudah disiapkan. Dan pembangunan waduk dipandang sangat penting oleh Pemda setempat untuk mengatasi kesulitan akses air bersih.

Di Kampung Wawa, Desa Kaligejo, tepat di lembah perbukitan, akan dibangun waduk bagi warga setempat. Lokasinya

sangat terisolir di tengah topografi yang berbukit dengan akses jalan yang sangat sulit dilalui. Delegasi Komisi V yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary



Tim Kunker Komisi V dipimpin Ketua Fary Djemi Francis tinjau Pelabuhan Aimere, NTT

Djemi Francis, Jum'at (14/10) mendatangi langsung kampung tempat rencana waduk ini dibangun.

"2017 akan diadakan studi kelayakan atas lokasi waduk ini. Kelak waduk ini bisa menampung 25 sampai 50 meter kubik air. Dan butuh waktu sekitar tiga tahun untuk merampungkan waduk tersebut. Dan sebelum waduk terbangun, akan dibangun sementara tiga embung. Komisi V tinggal menunggu laporan hasil studi kelayakan, setelah itu baru diputuskan," jelas Fary.

Setelah melihat lokasi waduk, delegasi Komisi V juga menyempatkan diri melihat Pelabuhan Aimere. Pelabuhan penyeberangan ini masih sangat minim fasilitas, belum ada terminal penumpang yang secara permanen dibangun. Dibutuhkan anggaran dan perencanaan kembali untuk membangun pelabuhan menjadi lebih baik.

Fary menambahkan, semua tinjauan ini menjadi catatan penting bagi Komisi V untuk dibicarakan dengan kementerian terkait. Para anggota Komisi V yang ikut meninjau adalah Sadarestuwati, Saifullah Rasyid, Sahat Silaban, dan Syahrulan Pua Sawa. ■

(mb) foto: buana/br

Komisi V Kawal Target Pembangunan Sembilan Bendungan Besar

Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan sembilan bendungan besar yang menjadi target pemerintah, dalam upaya mendorong swasembada pangan. Hal tersebut disampaikan Wakil ketua Komisi V Lasarus disela-sela rapat dengar pendapat dengan Dirjen PUPR, Sekjen Sumber Daya Air, dan Dirjen Cipta Karya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10).



Wakil ketua Komisi V Lasarus

“Tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sembilan bendungan besar, hal ini tentu untuk mendorong tercapainya target swasembada pangan. Tentu saja hal ini perlu diiringi dengan perbaikan pembuatan irigasi baru untuk lahan baru pertanian dalam rangka ketahanan pangan,” ucap Lasarus.

Ia berharap pembangunan sembilan bendungan besar yang akan diprogramkan pada tahun 2017 tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan pada tahun 2019 diharapkan beberapa bendungan dapat terselesaikan. "Kita akan kawal target dari pemerintah

tersebut, saat ini belum dapat kita gambarkan seperti apa serapannya nanti di lapangan, karena ini baru berupa program yang disampaikan kepada kita. Memang ada beberapa bendungan yang terjadi pendangkalan, seperti waduk Gajah Mungkur, dan saat ini sedang dilakukan pengerukan untuk normalisasi," tegas politisi dari F-PDIP dapil Kalbar itu.

Ia juga menjelaskan bahwa kalau debit airnya kurang maka kemampuan bendungan tersebut untuk melayani irigasi atau wilayah yang menggunakan sumber air dari situ, tentu akan menjadi terbatas.

"Disamping membangun, pemerintah juga harus merehabilitasi bendungan-bendungan yang memang kondisinya sudah mulai menurun. Jangan membangun baru, tetapi lupa memperbaiki yang sudah ada, termasuk juga bendungan yang baru saja di lakukan pengisian di wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan hal itu berjalan dengan lancar dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya," pungkasnya. ■

(dap) foto: andri/br



Panja RRU Sisbuk dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih

Dewan Perbukuan Jangan Mati Suri Dalam RRU Sisbuk

Panja RRU Sistem Perbukuan (Sisbuk) Komisi X DPR RI mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh Ikapi Jatim terkait Dewan Perbukuan.

“ Kami mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh Ikapi Jatim tentang Dewan Perbukuan. Panja RRU Sisbuk yang sedang dibahas DPR RI dan Pemerintah ini memang masih perlu masukan baik lisan maupun tertulis terutama mengenai Dewan (Kelembagaan) yaitu bentuk, istilah, dan fungsi. Insya Allah, RRU ini jadi paling lambat awal tahun depan,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih di ruang rapat Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jatim, baru-baru ini.

Pengurus Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sugeng memberi masukan tentang substansi Dewan Perbukuan. Ia berharap Dewan Perbukuan ini dapat berfungsi sebagaimana yang diatur dalam RRU Sisbuk ini. Jangan sampai mati suri dan dibubarkan seperti Dewan Buku Nasional, karena pembentukan Dewan Perbukuan ini mempunyai konsekuensi anggaran.

Selain itu, ia menilai sebaiknya yang memimpin Dewan Perbukuan adalah orang yang mempunyai kewenangan, minimal Wakil Presiden, karena lintas kementerian. Dengan kewenangan yang dimilikinya Pimpinan Dewan Perbukuan

ini diharapkan dapat menekan ke semua kementerian, sehingga RRU ini dapat dijalankan. Ia memberi contoh, Malaysia dan Singapura sudah terbentuk Dewan Perbukuan. Ini sangat membantu sekali terhadap perkembangan perbukuan di negara tersebut.

Sementara itu, Ferdiansyah selaku Ketua tim Panja RRU Sisbuk meminta Dewan Perbukuan ini kehadirannya harus benar-benar bermanfaat dalam konteks-konteks mengarahkan isi-isi buku, pengawasan dalam distribusi buku, dan juga bagaimana buku yang akan kedepan untuk pembangunan bangsa ini.

“Buku adalah bukan sekedar buku tapi buku adalah ilmu pengetahuan yang juga diantaranya berbasis budaya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Panja lainnya, Noor Achmad yang sepakat dengan dibentuknya Dewan Perbukuan dalam RRU Sisbuk ini guna mengawasi isi buku, baik terbitan nasional maupun terjemahan. Diharapkan pemerintah dapat hadir memberikan pengawasan dan perlindungan bagi penerbit dan pembaca. ■

(fca)/foto:ivan armanias/br

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

@dpr_ri

DPR RI

@DPR_RI

DPR RI



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Menemui Dubes Ukraina. Rabu(19/10),
Foto : Hamdis/hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menemui pendemo solidaritas perempuan NKRI, Senin (17/10),
Foto : Hamdis/hr



Komisi XI DPR RI Raker dengan Menkeu, Selasa (18/10),
Foto : Azka/hr



Komisi II DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Pertanahan Makasar, Foto : Jayadi/hr



Tim Pansus RUU Terorisme melakukan kunjungan ke Kopassus Cijantung, Foto : Arief/hr